

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
	14/09/2020		
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK		HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	
SKS	2	SEMESTER :	V
STATUS MK			
DOSEN PENGAMPU	Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Dani Durahman, S.H., M.H. Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 4. Menginternalisasi nilai,norma dan etika akademik; 5. Menerapkan dan mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan dan ketaatan. 	
	PENGETAHUAN	Menguasai konsep ilmu pengetahuan hukum sebagai landasan dalam menghadapi masalah hukum bagi praktisi hukum, akademisi maupun penggiat masyarakat.	
	KETRAMPILAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat yang relevan dengan ilmu dan keahliannya; 	

		<p>2. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan kedalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin;</p> <p>3. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri</p>
	KETRAMPILAN KHUSUS	<p>1. Mampu mengaplikasikan konsep dan pola pikir ilmu hukum serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan media/sumber belajar;</p> <p>2. Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang telah tersedia secara inovatif dan teruji;</p> <p>3. Mampu beradaptasi terhadap situasi terkini yang berkembang terutama dalam bidang ilmu hukum khususnya dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.</p>
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	<p>(C2)</p> <p>1. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;</p> <p>2. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan IPTEK;</p> <p>3. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya secara mandiri.</p>	
DESKRIPSI MATA KULIAH	<p>Mata kuliah ini meliputi konsep negara kesatuan dan federal, otonomi daerah dalam negara kesatuan, pengertian dan ruang lingkup hukum pemerintahan daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan legislasi tentang pemerintahan daerah, aspek hubungan antara pusat dan daerah, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, organisasi pemerintahan daerah, kewenangan kepala daerah, kewenangan DPRD, produk hukum daerah, pemilihan kepala daerah, otonomi khusus, daerah istimewa, daerah khusus, pemerintahan desa.</p>	
METODE PEMBELAJARAN	<p><i>Problem Based Learning</i></p> <p><i>Small Grup Discussion/ Cooperative Learning</i></p> <p><i>Contextual Teaching and Learning</i></p>	
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	<p>Presentasi dan <i>online exercise/kuiz</i></p>	
REFERENSI	<p>1. Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Press, Jakarta.</p> <p>2. Sirojul Munir, hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Genta Publishing, Jakarta.</p>	

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3. HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Rajawali Press, Jakarta.4. Josef Riwu Kaho, Prosfek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta |
|--|---|



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Hukum

Fakultas: Hukum

Mata Kuliah:		Hukum Pemerintahan Daerah	Kode:		SKS: 2		Sem: V
Dosen Pengampu:		Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Dani Durahman, S.H., M.H. Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H.					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		(C2) 1. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 2. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan IPTEK; 3. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya secara mandiri.					
1	2	3	4	5	6	7	
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)
1 dan 2	Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi tentang pengertian hukum Pemerintahan Daerah.	Pengertian hukum Pemerintahan Daerah.	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x2x50 Menit	Pemaparan materi dan Tanya jawab.	Ketepatan dalam mengidentifikasi tentang pengertian hukum Pemerintahan Daerah.	
3 dan 4	Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis mengenai hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terutama dalam otonomi daerah.	Hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terutama dalam otonomi daerah.	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x2x50 Menit	Pemaparan materi dan Tanya jawab.	Ketepatan dalam menganalisis mengenai hubungan pemerintah	

	daerah.					daerah dan pemerintah pusat terutama dalam otonomi daerah.	
5 dan 6	Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi tentang otonomi daerah terutama tentang daerah otonom, otonomi terbatas, otonomi luas, perbandingan otonomi luas dengan federalisme dan macam-macam sistem otonomi.	Otonomi daerah terutama tentang daerah otonom, otonomi terbatas, otonomi luas, perbandingan otonomi luas dengan federalisme dan macam-macam sistem otonomi yaitu otonomi materil, otonomi formil, otonomi riil, otonomi nyata dan bertanggungjawab .	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2x2x50 Menit	Pemaparan materi dan Tanya jawab	ketepatan dalam mengidentifikasi tentang otonomi daerah terutama tentang daerah otonom, otonomi terbatas, otonomi luas, perbandingan otonomi luas dengan federalisme dan macam-macam sistem otonomi.	
7	UTS						
8	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia.	Pembagian kekuasaan di Indonesia.	<i>Small Grup Disscusion/ Cooperative Learning</i>		Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas.	Ketepatan dalam menganalisis mengenai pembagian	

						kekuasaan di Indonesia.	
9	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu tentang prinsip keahlian, prinsip kedaerahan dan desentralisasi.	Penyelenggaraan pemerintahan yaitu tentang prinsip keahlian, prinsip kedaerahan dan desentralisasi Teritorial, Fungsional dan administratif.	<i>Small Grup Disccusion/ Cooperative Learning</i>		Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas.	Ketepatan dalam mengidentifikasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu tentang prinsip keahlian, prinsip kedaerahan dan desentralisasi.	
10	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tentang asas pokok penyelenggaraan pemda yang baik.	Penyelenggaraan pemerintahan yaitu tentang prinsip keahlian, prinsip kedaerahan dan desentralisasi Teritorial, Fungsional dan administratif.	<i>Problem Based Learning</i>		Pemaparan materi, Tanya jawab, diskusi kelas dan Tugas.	Ketepatan dalam menganalisis tentang asas pokok penyelenggaraan pemda yang baik.	
11 dan 12	Mahasiswa diharapkan mampu mengkaji tentang sejarah perkembangan Pemda di Indonesia.	Sejarah perkembangan Pemda di Indonesia.	<i>Small Grup Disccusion/ Cooperative Learning</i>	2x2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi kelas.	Ketepatan dalam mengkaji tentang sejarah perkembangan Pemda di Indonesia.	

13 dan 14	Mahasiswa mampu mengkaji tentang keuangan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.	Keuangan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.	<i>Problem Based Learning</i>	2x2x50 Menit	Pemaparan materi, Tanya jawab, diskusi kelas dan Tugas.	Ketepatan dalam mengkaji tentang keuangan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan .	
15	Review						
16	UAS						
Daftar Referensi:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Press, Jakarta. 2. Sirojul Munir, hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Genta Publishing, Jakarta. 3. HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Rajawali Press, Jakarta. 4. Josef Riwu Kaho, Prosfek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta 					